



**PENGARUH INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2000 - 2015**

*EFFECT OF INFLATION ON TOTAL INVESTMENT AND POOR PEOPLE IN
THE DISTRICT JEMBER YEAR 2000 - 2015*

SKRIPSI

Disusun Guna Sebagai Persyaratan Tugas Akhir Mahasiswa dan Sebagai Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
ABDUL LATIF HAMZAH
NIM:100810101063

ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ratna Ningsih dan Ayahanda Muhammad Hamzah yang tercinta;
2. Adik-adiku yang kusayangi Muhammad Krisna Surya Wijaya dan Nirwana Ummi Kulsum.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

MOTTO

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “ “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula” (QS. Al-Isra’: 7).

“Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka ia akan memotongmu”
(Ali bin Abu Thalib)

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan (Nabi Muhammad SAW)”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Latif Hamzah

NIM : 100810101063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Investasi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember tahun 2000-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 April 2017
Yang menyatakan,

Abdul Latif Hamzah
NIM: 100810101063

SKRIPSI

**PENGARUH INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2000 - 2015**

Oleh:

ABDUL LATIF HAMZAH

NIM:100810101063

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Anifatul Hanim, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Herman Cahyo D., SE, MP.

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk
Miskin di Kabupaten Jember Tahun 2000 - 2015

Nama Mahasiswa : Abdul Latif Hamzah

NIM : 100810101063

Konsentrasi : Regional

Tanggal Persetujuan : 2 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Anifatul Hanim, M.Si.

NIP: 19607301991032001

Dr. Herman Cahyo D., SE, MP.

NIP: 197207131999031001

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

NIP: 19641108 198902 2 0001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2000 – 2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Latif Hamzah

NIM : 100810101063

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal:

2 April 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs. Badjuri, M.E. (.....)
NIP: 195312251984031002

2. Sekretaris : Dr. Nanik Istiyani, M.Si (.....)
NIP: 196101211987022002

3. Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si (.....)
NIP: 197409132001122001

Mengetahui/Menyetujui
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.M. Ak.CA
NIP: 197107271995121001

**PENGARUH INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2000 – 2015**

Abdul Latif Hamzah

Jurusan Ilmu Ekonomi ,Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Jember

ABSTRAK

Tingginya angka pertumbuhan jumlah penduduk, dan inflasi dari tahun ke tahun diduga dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan juga angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Jember. Kemiskinan merupakan kondisi absolute dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Faktor negara yang sedang berkembang karena adanya laju pertumbuhan yang lambat. Dengan adanya kemiskinan yang semakin tinggi maka hal tersebut dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berkurang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi dan investasi terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten jember tahun 2000-2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah penduduk miskin di kabupaten jember dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami penurunan. Untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan data kurun waktu.

Kata kunci: Investasi, inflasi dan jumlah penduduk miskin.

***EFFECT OF INFLATION ON TOTAL INVESTMENT AND POOR PEOPLE IN
THE DISTRICT JEMBER YEAR 2000 - 2015***

Abdul Latif Hamzah

*Majoring In Economics and Development Studies, Economics Faculty, University
Jember*

ABSTRACT

The high number of population growth, and inflation from year to year is expected to increase the number of poor people and also increase the poverty rate that occurred in Jember regency. Poverty is an absolute and relative condition that causes a person or group of people within a region not to have the ability to meet basic needs. State factors are growing due to the slow growth rate. With the existence of poverty is higher then it can cause the level of welfare of the community is reduced. This research was conducted in Kabupaten Jember with the aim to know how big influence of inflation and investment to the number of poor people in jember regency year 2000-2015. This research is motivated by the still high number of poor people in jember district in the last six years has decreased. To know and challenge problem formulation in this research, researcher use multiple linear regression analysis method and time series data.

Key words: total investment, inflation, and poor people

RINGKASAN

Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kab Jember Tahun 200-2015; Abdul Latif Hamzah; 100810101063; 2017; (82) halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang karena kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari emukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri.

Kabupaten Jember Jawa Timur resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1929 dan merupakan pengembangan dari Karesidenan Besuki yang meliputi: Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso serta Besuki sendiri. Berdirinya Jember sebagai daerah baru tidak lepas dari pesatnya perkembangan perkebunan swasta pada pertengahan abad 19. Dalam perkembangan selanjutnya, Jember meninggalkan daerah induknya. Saat ini, Jember menjadi pusat ekonomi, social dan politik di timur Pulau Jawa. Namun Kondisi kemiskinan di Jember sendiri sama halnya dengan kondisi kemiskinan di jawa timur secara keseluruhan mengalami peningkatan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan yang termasuk dalam rumah tangga miskin. Objek peneliltian ini adalah meneliti tentang pengaruh variabel investasi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2000 sampai 2015. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi dengan menggunakan data time series.

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa variable investasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap JPM pada nilai α sebesar 5 persen. Nilai koefisien regresi variabel investasi adalah sebesar 311.12. Hal ini disebabkan karena investasi hakikatnya adalah investasi memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang sifatnya jangka panjang sehingga hasilnya tidak langsung dapat dirasakan saat ini. Variable inflasi sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap JPM pada nilai α sebesar 5 persen. Nilai koefisien regresi variabel inflasi adalah sebesar 15852,05. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya inflasi akan meningkatkan JPM dan angka kemiskinan di Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kab Jember Tahun 2000-2015**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Anifatul Hanim, M.Si dan Dr. Herman Cahyo D.,SE,MP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
2. Dr. Muhammad Miqdad,SE,M.M. Ak.CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember;
3. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Ibunda Ratna Ningsih dan Ayahanda Muhammad Hamzah yang telah membimbing dari kecil dan sekarang hingga dewasa
6. Adik saya tercinta Muhammad Krisna Surya Wijaya dan Nirwana Ummii Kulsum serta Almamater

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 2 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Kemiskinan Paradigma Neo-Liberal	12
2.1.2 Teori Kemiskinan Demokrasi Sosial	12
2.1.3 Definisi dan Penyebab Kemiskinan	18
2.1.4 Aspek dan Karakteristik Kemiskinan	18

2.1.5 Ukuran Kemiskinan.....	18
2.1.6 Konsep Pembangunan Ekonomi.....	21
2.2 Konsep Pengaruh Investasi Terhadap JPM.....	22
2.2.1 Teori Investasi Smith.....	24
2.3 Konsep Pengaruh Inflasi Terhadap JPM.....	24
2.3.1 Teori Inflasi Keynes.....	25
2.4 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	27
2.5 Kerangka konseptual	29
2.6 Hipotesis	30
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.2 Metode Analisis.....	32
3.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	32
3.2.3 Uji Statistik.....	33
3.2.4 Koefisien Determinasi Berganda.....	35
3.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.3 Definisi Operasional	38
BAB 4. PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum	39
4.1 Gambaran Letak dan Geografis Kota Jember.....	40
4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Jember.....	30
4.3 Kondisi Perekonomian Daerah.....	41
4.4 Deskripsi Variabel.....	42
4.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Jember Tahun 2000–2015.....	42
4.5 Perkembangan Investasi di Kabupaten Jember Tahun	

2000–2015.....	43
4.6 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Jember Tahun 2000–2015.....	45
4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
4.7.1 Hasil Uji Statistik.....	47
4.8 Uji Asumsi Klasik.....	48
4.9 Pembahasan.....	50
4.9.1 Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	51
4.9.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin...	52
BAB 5. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

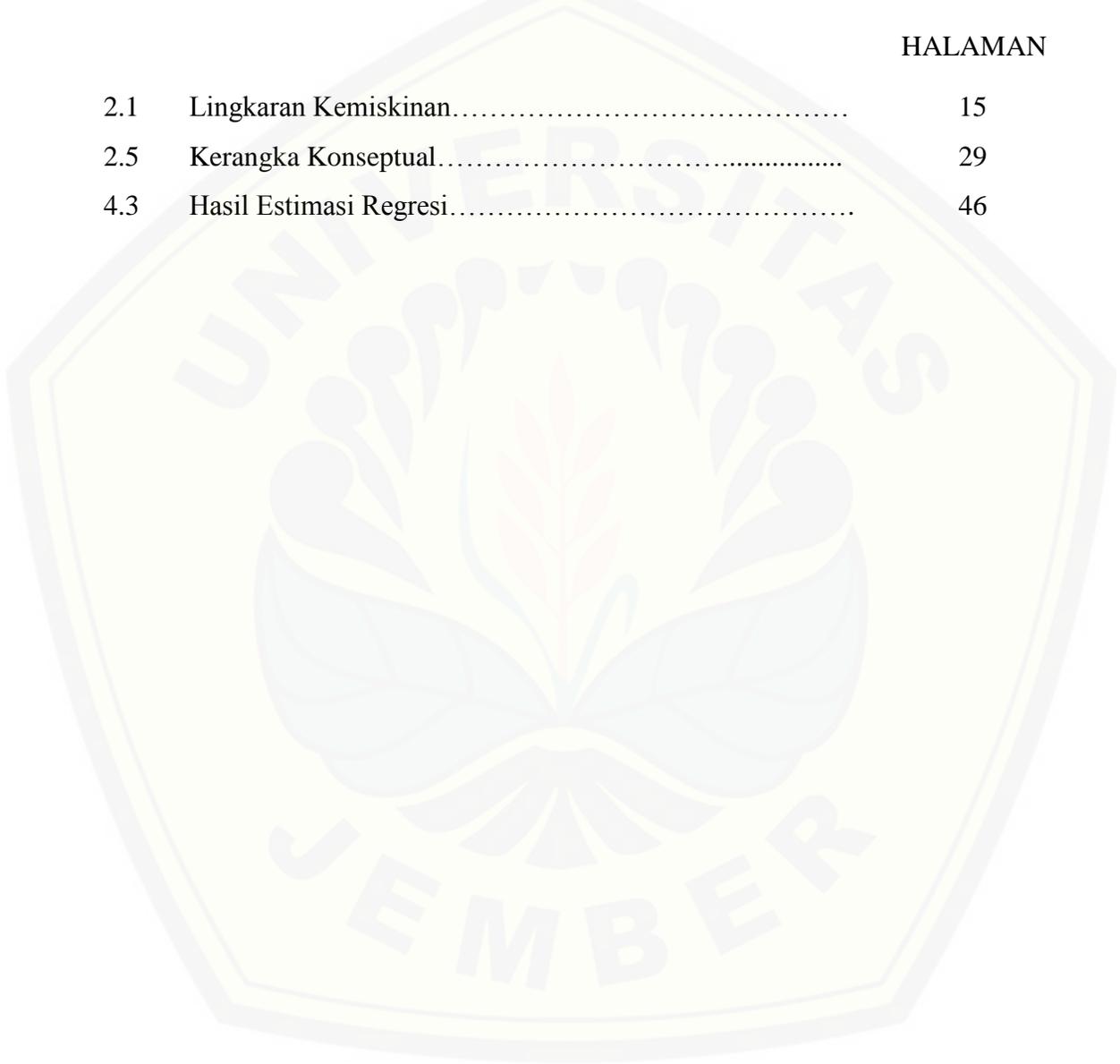
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
1.1.1 Perkembangan Kemiskinan di Jember Tahun 2010-2015.	5
1.1.2 Perkembangan Investasi di Jember Tahun 2011-2015....	8
1.1.3 Inflasi Jawa Timur dan Jember Tahun 2011–2015.....	9
2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	27
4.4 Jumlah Penduduk Miskin Jember Tahun 2000–2015.....	42
4.5 Perkembangan Inflasi di Jember Tahun 200-2015.....	43
4.2.4 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Jember 2000–2015..	45
4.3 Hasil Estimasi Regresi.....	46
4.4 Uji Normalitas.....	48
4.5 Uji Multikolinearitas.....	48
4.6 Uji Autokorelasi.....	49
4.7 Uji Heteroedastisitas.....	49

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
2.1 Lingkaran Kemiskinan.....	15
2.5 Kerangka Konseptual.....	29
4.3 Hasil Estimasi Regresi.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
A. Hasil Analisis Regresi.....	54
B. Uji Normalitas.....	55
C. Uji Multikolinearitas.....	56
D. Uji Autokorelasi	57
E. Uji Heterkedastisitas.....	58

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 6 persen per tahun. Namun pertumbuhan ini selain masih relatif lebih rendah, juga kualitas daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih memerlukan perbaikan agar selain tumbuh juga berkelanjutan dan dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Walaupun secara teori Pertumbuhan ekonomi secara teori mampu mengurangi kemiskinan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi bukanlah jaminan penuntasan kemiskinan. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu menjamin tingkan kemiskinan menurun. Keadaan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak terhadap ekonomi masyarakat

akut juga rendah sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata dan belum mampu membiayai seluruh sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan irigasi yang sangat dibutuhkan bagi meningkatkan produktifitas rakyat (Adi, 2011).

Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah pro-poor (Kraay, 2006). Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh (Todaro 2000).

Dampak pertumbuhan ekonomi secara teori mampu mengurangi kemiskinan akan tetapi pertumbuhan bukannya jaminan penuntasan masalah kemiskinan. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu menjamin

tingkat kemiskinan akan menurun. Bahkan pertumbuhan bisa jadi tidak ada kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan. Indonesia merupakan Negara yang kaya dan memiliki sumber daya alam yang luas, akan tetapi masyarakatnya masih banyak yang miskin. Status sosial ekonomi yang rendah bagi rakyat Indonesia, akibat yang menjanjikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam terbesar di dunia, tetapi hal ini belum menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Bukan pula tergantung dari umur negara tersebut melainkan dapat tercermin dari sikap dan perilaku mengikuti prinsip – prinsip dasar kehidupan. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh tiap manusia dapat terbentuk melalui proses pembelajaran khususnya di bangku pendidikan formal sehingga menciptakan modal manusia yang mengikuti prinsip dasar kehidupan (Sendouw, 2006).

Indonesia adalah negara telah merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan. Menurut Sondang P.Siagian (1999), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Bintoro (1988) bahwa pembangunan dapat diartikan pula sebagai suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum atau rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja pembangunan perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan adalah menurunkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi (Nasir, Muh, Saichudin dan Maulizar; 2008).

Menurut teori pembangunan ekonomi, penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif yaitu: di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk berjumlah besar dengan kualitas yang rendah merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan konsumsi. Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur yang semakin jauh melampaui batas ideal, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, dan angka kemiskinan yang rentan akan kriminalitas.

Jumlah penduduk yang cukup besar di Jawa Timur bisa menjadi penggerak perekonomian disebabkan jumlah penduduk Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan relatif terkendali namun, tingkat kepadatannya semakin jauh melewati angka kepadatan penduduk ideal di Jawa Timur yakni ± 700 jiwa/km² sehingga angka tersebut menjadi pendorong di Pulau Jawa timbul sebuah masalah yaitu kemiskinan. Siregar dan Wahyuniarti (2008) mengemukakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian saat ini, dan pusat perhatiannya adalah kota Jember.

Meski dua tahun berturut-turut kabupaten Jember meraih Otonomi Award kategori khusus di bidang pengentasan kemiskinan. Namun angka kemiskinan di Jember semakin bertambah. Di Jember rumah tangga miskin bertambah 80,977 rumah tangga. Berdasarkan data BPS yang menunjukkan kenaikan angka rumah tangga miskin dari 237.700 rumah tangga menjadi 318.677 rumah tangga (BPS, 2002). Data Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Jember berdasarkan survei tahun 2008 dan dirilis tahun 2009 menunjukkan jumlah RTSM sebanyak 237 ribu jiwa. Sedangkan hasil survey 2011 yang dirilis tahun 2012 disebutkan keluarga miskin melonjak menjadi 246 ribu keluarga. Artinya, terjadi kenaikan keluarga miskin sebanyak 9 ribu keluarga. Kabupaten Jember meraih urutan ke-21 termiskin di Jawa Timur. Ada penurunan signifikansi dari satu digit menjadi dua digit. Secara absolut waktu itu orang miskinnya terbanyak, karena jumlah penduduk Kabupaten Jember juga banyak, yakni 2,3 juta jiwa dan keluarga miskin sebanyak 237.700 rumah tangga (BPS, 2012).

Tabel 1.1.1 Perkembangan Kemiskinan di Jember Tahun 2010 - 2015.

No	Tahun	Jumlah	Persentase	P1(%)	P2(%)
		Kemiskinan (Jiwa)	Kemiskinan		
1	2010	311.800	13,27	2,00	0,52
2	2011	292.100	12,44	1,72	0,38
3	2012	277.000	11,76	1,59	0,34
4	2013	278.500	11,68	1,25	0,22
5	2014	270.400	11,28	1,11	0,20
6	2015	265.400	11,22	1,58	0,39

Sumber : BPS Jawa Timur, Susenas 2016.

Tabel diatas tercatat bahwa kondisi kemiskinan mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebanyak 269.540 jiwa dan angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2014 sebanyak 270.400 jiwa.

Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tercatat jumlah penduduk miskin secara makro di Jember tahun 2015 turun sebesar 0,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. penduduk dibawah garis kemiskinan di Jember pada tahun 2010 sebanyak 311.800 jiwa, tahun 2011 sebanyak 292.100 jiwa, tahun 2012 sebanyak 277.000 jiwa, tahun 2013 sebanyak 278.500 jiwa, tahun 2014 sebanyak 270.400 jiwa dan tahun 2015 sebanyak 269.540 jiwa.

Berdasarkan persentase, tercatat penduduk miskin tahun 2010 sebesar 13,27 persen, tahun 2011 (12,44 persen), tahun 2012 (11,76 persen), tahun 2013 (11,68 persen), tahun 2014 (11,28 persen), dan tahun 2015 sebesar 11,22 persen serta Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,11 pada tahun 2014 menjadi 1,58 pada tahun 2015, sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,20 pada tahun 2014 menjadi 0,33 pada tahun 2015.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dan pada tahun 2015 sebesar 283.510 rupiah dinyatakan sebagai warga miskin.

Inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci *deprivation trap* terdiri atas lima unsur, yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. Berdasarkan penelitian Djannata (2011:3) penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah satu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat

pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketertinggalan SDM (Sumber Daya Manusia), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Berdasarkan pemikiran Kuncoro (1997:134), rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah. Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti

kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari

banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sikap dan

perlakuan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Kemudian ketidakadilan sosial ekonomi, selain oleh beragam alasan juga disebabkan oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat.

Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1929 dan merupakan pengembangan dari Karesidenan Besuki yang meliputi: Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso serta Besuki sendiri. Berdirinya Jember sebagai daerah baru tidak lepas dari pesatnya perkembangan perkebunan swasta pada pertengahan abad 19. Dalam perkembangan selanjutnya, Jember meninggalkan daerah induknya. Saat ini, Jember menjadi pusat ekonomi, sosial dan politik di timur Pulau Jawa.

Kabupaten jember merupakan daerah yang masuk dalam urutan pertama terkait angka kemiskinan di Jawa Timur tahun 2008. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, mencapai 237.700 RTM (Rumah Tangga Miskin). Jumlah tersebut ternyata banyak, jika dibandingkan dengan 38 Kabupaten lain di Jawa timur. Penduduk miskin adalah pihak yang memiliki pendapatan rata-rata dan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, untuk Kabupaten Jember yaitu di bawah Rp 132.240/bulan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2009). Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan kemiskinan menjadi tiga kelompok yaitu, sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Usaha untuk mengurangi kemiskinan yang menjadi masalah di Jember, pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengembangan

investasi nasional: baik yang dilakukan oleh negara melalui investasi pemerintah, maupun investasi yang dilakukan oleh swasta. Penyelenggaraan investasi atau penanaman modal di Jember hanya bisa tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum dibidang penanaman modal, ketenagakerjaan dan keamanan usaha. Dengan adanya perbaikan berbagai faktor tersebut, diharapkan penanaman modal akan membaik secara signifikansi (Aprilianti, 2014).

Tabel 1.1.2 Perkembangan Investasi di Kota Jember Tahun 2011 – 2015.

No	Tahun	Investasi (Jutaan Rupiah)
1	2011	175.970.000
2	2012	39.100.000
3	2013	70.850.000
4	2014	77.950.000
5	2015	84.950.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2016.

Tingkat investasi di Jember tahun 2011 sebesar 175.970.000 rupiah dibandingkan dengan tahun 2012 dengan investasi yang sebesar 39.100.000 rupiah, investasi ini jauh lebih di tinggi. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah. Sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 investasi meningkat secara perlahan yaitu sebesar 70.850.000, 77.950.000 ,dan 84.950.000 rupiah. Keberhasilan kinerja investasi di dalam negeri yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tentunya akan memberi kontribusi yang positif bagi pemulihan kondisi ekonomi daerah. Hal ini tergantung sejauh mana berbagai kendala ekonomi

yang menghambat pemulihan investasi dapat diatasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Selain investasi, inflasi merupakan salah satu indikator suatu negara bagi kestabilan ekonomi yang selalu menjadi pusat perhatian pemerintah di Jawa Timur. Inflasi merupakan variabel makro ekonomi dimana pemerintah harus selalu menjaga tingkat kestabilannya. Selain itu, inflasi merupakan cerminan dari stabilitas tingkat harga yang kemudian mempengaruhi pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tabel 1.1.3 Inflasi Jawa Timur dan Jember Tahun 2011 - 2015.

No	Tahun	Jawa Timur(%)	Jember(%)
1	2011	4,66	2,43
2	2012	4,41	4,49
3	2013	8,23	7,21
4	2014	7,53	7,52
5	2015	3,47	2,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2016.

Tingkat inflasi di Jember tahun 2012 sebesar 4,49 persen masih lebih tinggi 0,08 persen dibanding tingkat inflasi di Jawa Timur yang mencapai 7,53 persen. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat tiga kali Jawa Timur mengalami inflasi yang nilainya diatas inflasi Jember yaitu pada tahun 2013 sebesar 8,23 persen atau lebih tinggi 1,02 persen, dan pada tahun 2014 sebesar 7,53 persen atau lebih tinggi 1,01 persen. Tahun 2015, tingkat inflasi di Jawa Timur 3,47 persen lebih tinggi 1,20 persen dari tingkat inflasi di Jember yang mencapai 2,27 persen.

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap kesempatan kerja. Dengan tingginya harga akibat dari adanya inflasi dan untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen akan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output) (Sukirno, 2004).

Apabila tingkat inflasi dihitung merupakan inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi yang akan berpengaruh pada rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena salah satu penyebabnya adalah tingginya jumlah penduduk dan kurangnya lapangan kerja untuk pemenuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Selain itu, kemiskinan bisa disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menabung karena hal ini akan melemahkan investasi dan penciptaan usaha kerja. Faktor inflasi merupakan faktor lain yang akan mendukung kemiskinan karena apabila inflasi tersebut tidak terkontrol maka akan mempengaruhi stabilitas perekonomian negara sehingga rentan akan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh investasi dan inflasi terhadap terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, serta bagaimana pengaruh estimasi hasil dari variabel investasi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, sehingga pokok rumusan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

- 1) Apakah variabel investasi berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember ?
- 2) Apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisa seberapa besar pengaruh variabel investasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember,
- 2) Menganalisa seberapa besar pengaruh variabel inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi yang positif pada berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan bahan pustaka yang dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan pertimbangan serta kajian dalam penelitian sebelumnya,
- 2) Sebagai sarana pelatihan dan pembelajaran dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan,
- 3) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan solusi pemecahan terhadap permasalahan dalam mengurangi kemiskinan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan Paradigma Neo-Liberal

Teori ini menekankan individu dan mekanisme pasar sebagai fokus utama dalam melihat kemiskinan. Dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini, kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu cara utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan bagi pendekatan ini, strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum, kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak lagi mampu menangani kemiskinan (Febriana, 2010).

Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002, dalam Febriana, 2010). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional atau GNP, yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” (Suharto, 2009).

2.1.2 Teori Kemiskinan Paradigma Demokrasi-Sosial

Teori ini tidak melihat kemiskinan sebagai akibat dari persoalan individu, melainkan melihat dari persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling selektif (Chyene, O’Brein dan Belgrave 1998, dalam Febriana 2010).

Pendekatan dari teori ini menekankan pada kesetaraan sebagai syarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. disinilah peranan negara diperlukan untuk memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Febriana, 2010).

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalma merumuskan strategi menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana sosial, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan terjadinya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (Febriana, 2010).

2.1.3 Definisi dan Penyebab Kemiskinan

Banyak pemahaman tentang kemiskinan yang dikemukakan para ahli, salah satu pemahaman yang dimaksud dikemukakan Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) (dalam Mikkelsen, 2003) yang memandang kemiskinan sebagai Suatu kemelaratan dan ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam suatu standar hidup tertentu yang mengacu kepada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya maupun miskin. Sedangkan konsep absolut dari kemiskinan adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak dan lain-lain.

Usman (2003), mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (deprivation) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidupnya serba

kekurangan. Sedangkan pemahaman tentang masalah kemiskinan, menurut Sumodiningrat (1999).

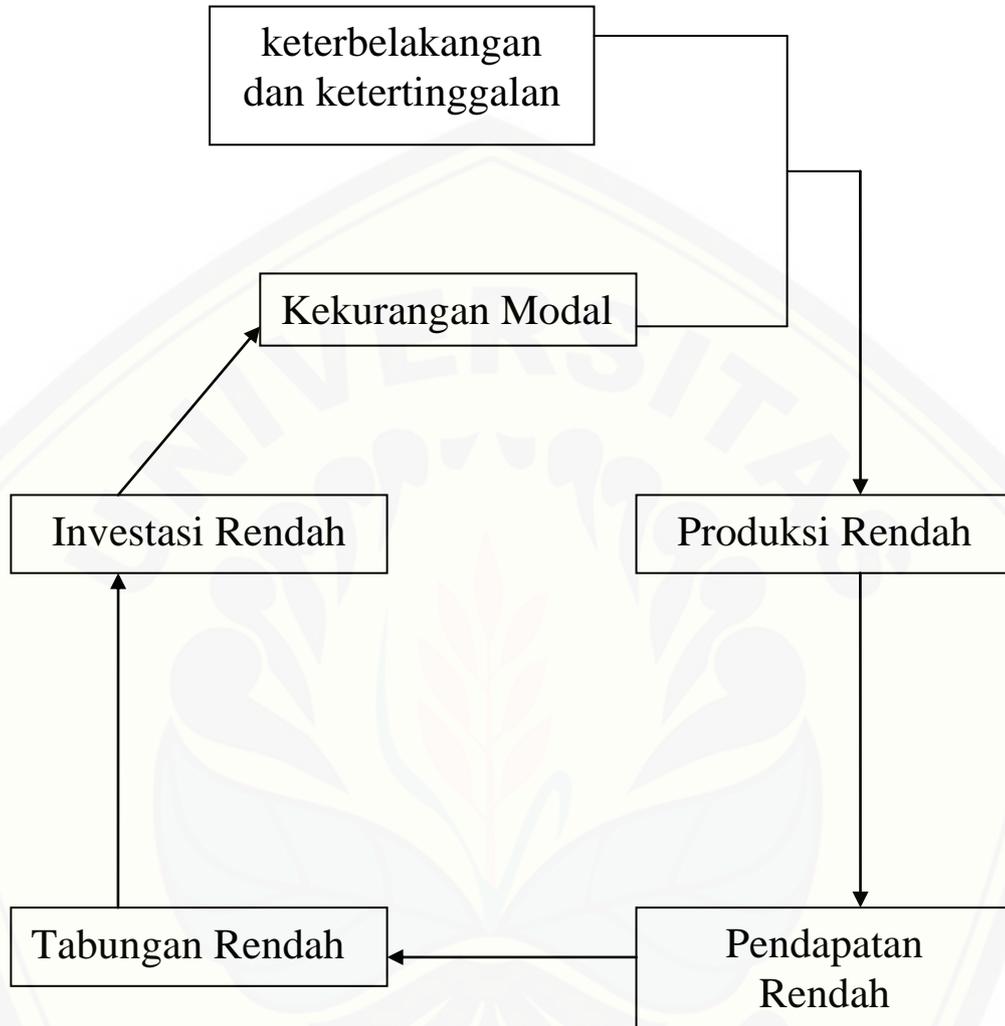
Masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (*Material Well-being*), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (*Social Well-being*).

Dari pandangan di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan-persoalan ekonomi saja. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

Dari pandangan di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan-persoalan ekonomi saja. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

Berdasarkan penelitian Djannata (2011), penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah satu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketertinggalan SDM (Sumber Daya Manusia), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Berdasarkan pemikiran Kuncoro (1997), rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan

kerja rendah. Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (Kuncoro, 1992)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok papan, sandang, maupun pangan dan juga rendahnya kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Masalah kemiskinan sering terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang

dapat memicu ketimpangan sosial. Menurut Nasikun (2001:97) kemiskinan dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan mutlak (*absolute poverty*): bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang dan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja
- 2) Kemiskinan relatif (*relative poverty*): kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan
- 3) Kemiskinan budaya (*culture poverty*): mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas dan pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari luar
- 4) Kemiskinan struktural (*structural poverty*) : kondisi yang disebabkan karena rendahnya akses sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial politik yang mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Perkembangan terakhir, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005). Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- 2) Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumberdaya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- 1) *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- 2) *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- 3) *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- 4) *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- 5) *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- 6) *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- 7) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- 8) *Exploitative intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- 9) *Internal political fragmentation and civil strife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- 10) *International processes*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.1.4 Aspek dan Karakteristik Kemiskinan

Selain beberapa faktor diatas, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh beberapa aspek. (Andre Bayo Ala dalam Arsyad, 1997) menyebutkan terdapat beberapa aspek kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan ini multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan tidak sehat, perawatan kesehatan kurang baik, dan pendidikan yang kurang baik
2. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Bahwa kemiskinan adalah manusianya baik secara individual maupun kolektif.

2.1.5 Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per orang per hari. Sedangkan untuk kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2007) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. 3. Indeks Keparahan Kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sedangkan berdasarkan BPS (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan minuman yang diukur dari sisi pengeluaran dengan menggunakan metode hitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri atas dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan per orang dibawah garis kemiskinan.

Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Criswardani Suryawati, 2005).

Daerah pedesaan:

- 1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

- 1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Criswardani Suryawati, 2005). Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Criswardani Suryawati, 2005), yaitu:

- 1) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
- 2) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

Ukuran kemiskinan menurut *Foster-Greer-Thorbecke* (dalam Todaro, 2004):

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

a = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y < z$.

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

Jika:

- 1) a = 0, maka diperoleh *Head Count Index* ($0 P$), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- 2) a = 1, maka diperoleh *Poverty Gap Index* ($1 P$), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- 3) $a = 2$, maka diperoleh *Poverty Severity* ($2P$), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.6 Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dilihat dari definisi pembangunan ekonomi sendiri mempunyai tiga sifat penting pembangunan ekonomi merupakan (Sukirno, 1958:):

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Menurut Todaro dalam penelitian Arsyad (1999), mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga hal pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Meningkatkan rasa harga diri.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih, yang merupakan salah satunya hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai satu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan demikian dapat diketahui runtutan peristiwa yang timbul dalam mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari tahap pembangunan yang satu ketahap pembangunan selanjutnya (Arsyad, 1999).

2.2 Konsep Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut teori Schumpeter dikutip dalam Sukirno (2006), menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi investasi. Dalam teori ini, ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini, investasi akan terus dilakukan dan pertambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Menurut Murni (2006), investasi yang dilakukan perusahaan merupakan komponen terbesar dalam suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perekonomian negara.

Kegiatan investasi ini memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian makro, kenaikan investasi berhubungan positif dengan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Menurut Satrio (2018) investasi akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga pengangguran berkurang dikarenakan investasi akan menciptakan pertambahan output nasional. Besar kecilnya perolehan investasi akan mempengaruhi penyediaan kesempatan kerja. Jadi, semakin besar perolehan investasi akan meningkatkan persediaan lapangan kerja baru yang akan mengakibatkan tingkat kesempatan kerja bertambah dan penyerapan tenaga kerja ikut bertambah.

Pembentukan modal merupakan faktor penting di dalam proses pembangunan ekonomi juga sebagai kunci utama menuju pertumbuhan ekonomi (Sumitro, 1994). Salah satu upaya untuk menciptakan pembentukan investasi (Enke, 1963), investasi lazim disebut juga dengan penanaman dalam bentuk modal dan merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran dilakukan pengusaha (RTP) dan bisa

oleh dilakukan pemerintah (RTN) untuk membeli barang-barang modal ataupun peralatan-peralatan produksi (Murni, 2006). Tujuannya untuk mengganti atau menambah barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memperbesar jumlah produksi yang akan datang.

Berdasarkan usaha mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investai (suatu pembentukan atau penanaman modal) sebagai berikut (Sukirno 1997):

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industry;
2. Pembelian untuk pembangunan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya; dan
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Barang-barang yang masih dalam produksi masuk dalam pendapatan nasional

Jumlah dari ketiga jenis komponen tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasi. Apabila investasi bruto dikurangi nilai depresiasi maka akan menghasilkan investasi netto. Perbedaan nilai netto dan bruto disebut dengan depresiasi.

Menurut Dumairy (1997), kegiatan investasi masyarakat dalam swasta asing perekonomian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Investasi dalam negeri
Adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta nasional;
2. Investasi asing
Adalah investasi yang dilakukan pemerintah asing

Investasi sebagai faktor dalam perkembangan ekonomi di suatu wilayah atau negara yang dapat terlihat dari besarnya investasi yang dilakukan sehingga, dari investasi ini akan menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian dan produktivitas yang terjadi di wilayah atau negara tersebut. Adanya investasi memberikan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa dan membawa dampak positif bagi suatu negara ataupun wilayah, hal ini dikarenakan investasi akan menciptakan output nasional, pendapatan dan penyerapan tenaga

kerja yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, maka tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan investasi, yaitu berupa “penciptaan nilai tambah (*Value Added*)”.

2.2.1 Teori Investasi Smith

Menurut Smith, akumulasi modal menerapkan syarat utama dalam pembangunan ekonomi yaitu bagaimana kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanamkan modalnya. Tujuan Pembangunan ekonomi adalah membangun peralatan modal dengan skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas suatu perekonomian, maka akan terjadi penambahan tenaga kerja yang dipergunakan untuk proses produksi, sehingga kesempatan kerja juga akan meningkat (Lestari, 2011). Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, yaitu pengangguran berkurang dan jumlah penduduk miskin menurun.

Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap daerah senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Dengan adanya investasi pemerintah maupun investasi swasta baik PMA dan PMDN akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan barang jasa dikonsumsi meningkat akhirnya kesejahteraan meningkat serta mengurangi jumlah penduduk miskin yang menjadi beban di sisi pembangunan (Pratiwi, 2005)

2.3 Konsep Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut teori Keynes yang dikutip dalam Sukirno (2006), inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian

rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbul apa yang disebut dengan *Inflationary Gap*).

Proses perebutan ini kemudian diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Karena permintaan tersebut melebihi barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga tersebut berarti bahwa sebagian rencana dari pembelian barang-barang dari kelompok tersebut tidak terpenuhi. Pada periode selanjutnya golongan tersebut akan berusaha memperoleh dana yang lebih besar lagi (dari percetakan uang baru atau kredit bank yang lebih besar atau dari kenaikan gaji yang lebih besar). Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang dihasilkan oleh masyarakat.

Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang penting, karena variabel ini dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk suatu negara. Menurut Nanga (2005), Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab kesenjangan pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.

2.3.1 Teori Inflasi Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut

berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum secara berkelanjutan, yang merupakan salah satu variabel makro yang penting, karena dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk suatu negara.

Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga barang itu meliputi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dan akan mempengaruhi harga barang lain dipasar. Berkelanjutan berarti kenaikan harga hanya terjadi sesaat saja (Suparmono, 2004). Meningkatnya uang yang beredar akan menyebabkan meningkatnya harga barang pula. Karena dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk, Inflasi yang tinggi mengimplikasikan penurunan daya beli sehingga kemampuan masyarakat untuk menikmati barang dan jasa semakin berkurang, dengan kata lain kemakmuran berkurang.

Kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total. Karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kualitas uang tetap atau konstan. Jika uang yang beredar bertambah maka harga akan naik. Dengan naiknya harga, permintaan uang untuk transaksi juga akan ikut bertambah sehingga suku bunga juga ikut naik. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi.

kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total. Karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kualitas uang tetap atau konstan. Jika uang yang beredar bertambah maka harga akan naik. Dengan naiknya harga, permintaan uang untuk transaksi juga akan ikut bertambah sehingga suku bunga juga ikut naik. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi.

Analisa Keynes tentang inflasi permintaan yang dirumuskan berdasarkan konsep *inflationary gap*: **inflasi permintaan adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, program investasi yang besar-besaran dalam capital sosial.** Jika dirumuskan menjadi:

Inflasi = (jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi).

2.4 Tinjauan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chairul Nizar, Abu Bakar Hamzah, Sofyan Syahnur Fak Ilmu Ekonomi Univ Syiah Kuala (2012) Jurnal	Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya terhadap kemiskinan di Indonesia (Data Time Series Daerah)	Pengaruh variabel estimasi pertumbuhan ekonomi hasil analisis variabel FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan
2	Tito Cahya Pratama Putra Jurusan IESP Univ Jember(2015) Skripsi.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, PDRB, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember 2000-2012 (Metode	1. Variabel jumlah penduduk, pengangguran, PDRB dan Inflasi tidak selalu memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 2. Variabel inflasi dan PDRB tidak memiliki
3	Helmi Winda Wati Jurusan Ilmu Ekonomi Fak Ekonomi & Bisnis Univ Brawijaya Malang (2015) Jurnal Ilmiah	Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi dan IPM Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2013 (Metode Regresi	Hasil penelitian ini adalah variabel investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4	Anak Agung Istri Diah Paramita dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja Fak Ekonomi & Bisnis Univ Udayana Bali (2015) Jurnal Ekonomi	Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali (Metode Path Analysis)	1. Variabel investasi ber- pengaruh negatif dan signifikansi terhadap tingkat kemiskinan. 2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap tingkat kemiskinan.

Lanjutan Tabel 2.4

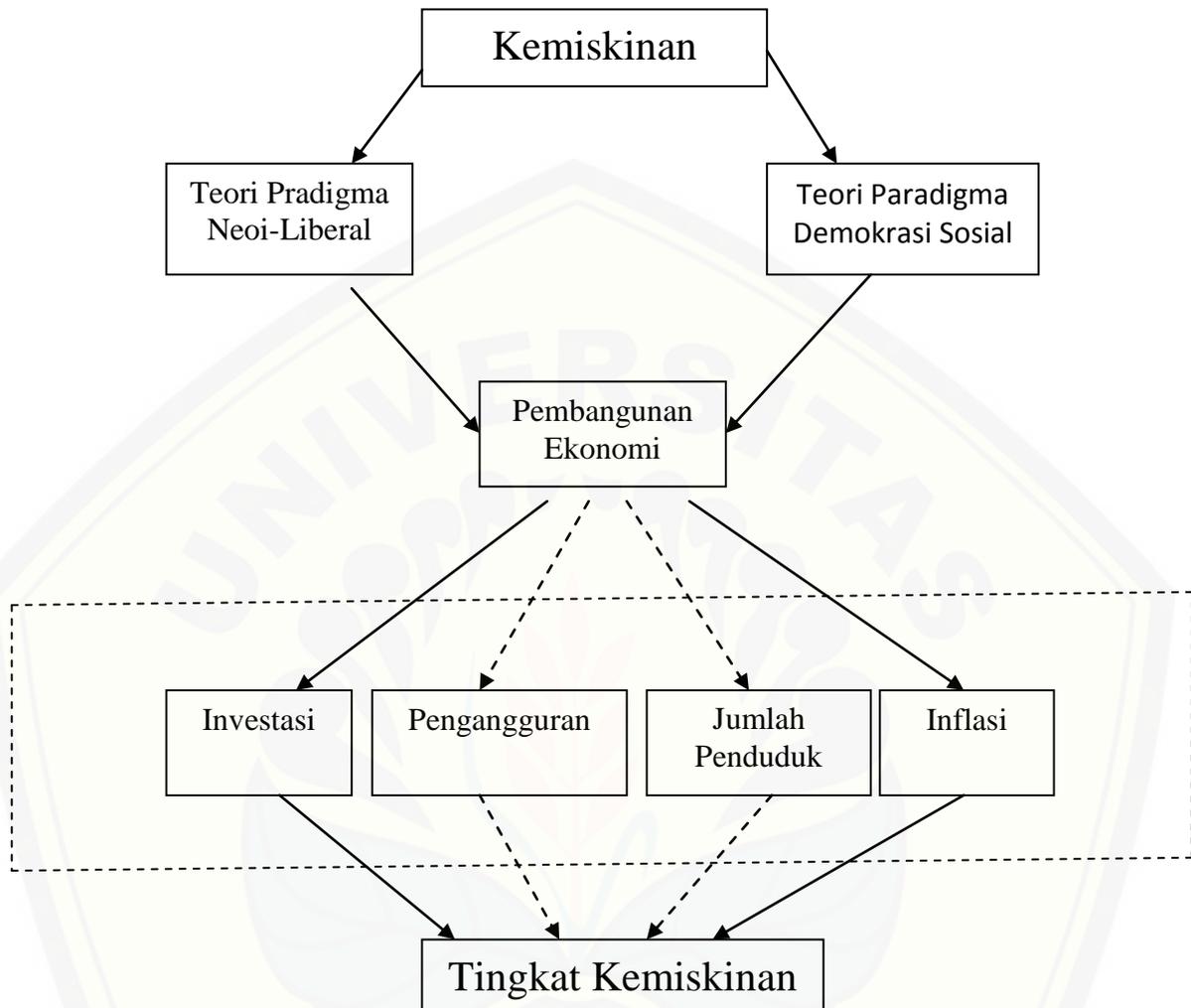
No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Candra Mustika (2011) Jurnal	Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. <i>Metode Analisis Regresi</i>	Variabel jumlah penduduk dan PDB masing masing berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan
6	Dody Nursetyo Yekti Hapsoro (2013) Skripsi	Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (studi kasus 44 kota di	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan variabel pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan
7	Durrotul Mahsunan (2013) Jurnal	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. <i>Metode analisis regresi linear</i>	Variabel Jumlah Penduduk dan Pendidikan sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran sedangkan <i>pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan</i>
8	Ika Dian Nita (2014) Skripsi	Determinan Kemiskinan di Kabupaten Jember. Menggunakan metode analisis regresi linear berganda	PDRB dan pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah keluarga miskin si kabupaten jember

Hasil penelitian dari delapan penelitian tersebut menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, di antaranya terdapat persamaan dalam penggunaan variabel di dalam penelitiannya dan di antara variabel yang sama tersebut juga terdapat persamaan bahwa hasil penelitian menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kemiskinan, dari kedelapan hasil penelitian tersebut juga terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama memberikan hasil adanya pengaruh dan semua variabel yang digunakan terhadap kemiskinan, namun sedikit perbedaan juga ditunjukkan dalam penelitian ini seperti metode atau alat analisis yang digunakan berbeda.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan teoritis dan penelitian terdahulu diatas, kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, dimana tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dilihat dari paradigma neo-liberal dan sosial demokrasi, kemiskinan disebabkan karena kurangnya kemampuan dan seseorang untuk berinvestasi sehingga lapangan kerja menurun dan pengangguran meningkat dan inflasi yang tinggi sehingga daya beli menurun serta kesejahteraan masyarakat menurun. Selain itu adanya perkembangan penduduk yang tinggi yang menjadi beban dalam pembangunan maka dalam jangka panjang tingkat kesejahteraan juga ikut semakin menurun

Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman atas alur pemikiran dalam fokus penelitian yang menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah investasi dan inflasi terhadap kemiskinan. Gambar 2.5 Merupakan ilustrasi gambar model kerangka berfikir untuk mengetahui pengaruh Investasi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin.



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 2006). Berdasarkan studi empiris penelitian yang pernah dilakukan dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga variabel investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember.
- 2) Diduga variabel inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, jenis penelitian ini adalah menggunakan metode *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui (menguji) ada tidaknya hubungan, sifat hubungan dan besar hubungan antara dua variabel atau lebih (Singaribun dan Effendi, 1998).

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian memiliki ruang lingkup yang sederhana yaitu di Kabupaten Jember dengan kurun waktu penelitian ini dimulai pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember karena ingin melihat lagi perkembangan perekonomian di Jember dengan menggunakan investasi dan inflasi yang akan memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, maka dari itu pemilihan wilayah ini dianggap nantinya dapat bermanfaat kedepannya untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan dengan jumlah penduduk miskin yang dihadapi.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dalam runtun waktu (*time series*). Data yang digunakan meliputi: investasi, inflasi dan jumlah penduduk miskin. Selain itu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh pihak lain seperti buku-buku, literatur, catatan-catatan dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini tidak meneliti objek secara langsung untuk memperoleh data, melainkan mempergunakan data yang sudah tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dinas kependudukan dan tenaga kerja, biro atau keuangan Jember, dinas perindustrian dan perdagangan, badan pusat statistik, maupun instansi-instansi lainnya.

3.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis dan metode dalam menjawab pertanyaan yang timbul dari rumusan masalah. Alat analisis tersebut yaitu analisis regresi linear berganda dan merupakan model analisis yang dipilih karena untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel dengan variabel lainnya yang ada di dalam analisis tersebut ditentukan suatu persamaan yang menaksir sifat hubungan fungsional diantara variabel yang akan diteliti.

3.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh investasi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember periode tahun 2000-2015 digunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini mencakup lebih dari dua variabel (termasuk variabel terikat Y), dimana dalam regresi linier berganda variable terikat Y tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Model regresi yang digunakan sebagai berikut (Gujarati, 2010). Berikut adalah persamaan umum model regresi linier berganda:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_t \dots$$

Penelitian ini sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam model persamaan regresi berganda pada judul Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2000-2015. Mencermati judul tersebut maka penelitian tersebut menggunakan data *time series* dan jenis data tahunan.

Keterangan :

Y	= Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Jember
$\beta_1 X_1$	= Investasi di Kabupaten Jember
$\beta_2 X_2$	= Inflasi di Kabupaten Jember
t	= Waktu Tahun 2000 – 2015
α	= Konstanta
e	= Standar error

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka menggunakan uji statistik.

3.2.3 Uji Statistik

Uji statistik dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis sesuai dengan kenyataan atau tidak.

1. Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan atau bersama-sama. Uji f digunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati 2000), rumus uji f sebagai berikut

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)}$$

Keterangan:

- R² = koefisien determinasi
- K = jumlah variabel
- N = jumlah sampel

Rumusan Hipotesis:

- 1) $H_0: \beta_1, \beta_2 = 0$ (tidak ada pengaruh)

Artinya secara bersama-sama variabel bebas investasi dan inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kemiskinan.

- 2) $H_i: \beta_1, \beta_2 \neq 0$ (ada pengaruh)

Artinya secara bersama-sama variabel bebas investasi dan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat kemiskinan.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesis (Gujarati, 2004) sebagai berikut :

- 1) Jika f probabilitas $> level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 diterima dan H_i ditolak,
- 2) Jika f probabilitas $\leq level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 ditolak dan H_i diterima .

2) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel yang berpengaruh (variabel independent) terhadap variabel dependen secara individual (Parsial) maka digunakan uji t. Rumus yang digunakan (Gujarati, 2004) sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{S_e(\beta_i)}$$

Keterangan :

- t = nilai t hitung
 b_i = koefisien regresi
 $S_e(\beta_i)$ = standar error deviasi

Rumusan Hipotesis :

1. $H_0 : \beta_i = 0$

Artinya bahwa β_i sebagai variabel investasi dan inflasi berpengaruh secara individual (parsial) terhadap variabel terikat kemiskinan.

2. $H_i : \beta_i \neq 0$,

Artinya bahwa β_i sebagai variabel investasi dan inflasi tidak berpengaruh secara individual (parsial) terhadap variabel terikat kemiskinan.

Pengujian hipotesis:

- 1) Jika $t\ value \leq level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 ditolak dan H_i diterima.
- 2) Jika $t\ value \geq level\ of\ significance$ ($\alpha=5\%$), maka H_0 diterima dan H_i ditolak.

3.2.4 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Dalam pengujian ini diuji sejauh mana variabel dari variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 merupakan fraksi dari variasi yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat (Hapsoro, 2013). Semakin tinggi koefisien determinasi tersebut, maka semakin tepat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi tersebut maka semakin lemah kemampuan model tersebut dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 dapat dirumuskan sebagai berikut (Wardhono, 2004) :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$\text{Bernilai } 0 < R^2 < 1$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinan

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS = jumlah kuadrat total

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai R^2 hampir mendekati 1, maka terdapat hubungan korelasi yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika nilai R^2 mendekati 0, maka tidak terdapat hubungan korelasi yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.2.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model yang baik secara teoritis, maka suatu proses harus memenuhi beberapa asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dilakukan terhadap suatu model regresi, yaitu uji normalitas, uji multikolineartias, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi (Hapsoro, 2013) antara lain :

1) Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan r mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menyatakan adanya hubungan linear (Korelasi) yang sempurna dan pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Mengetahui terjadinya multikolinearitas dapat dideteksi melalui uji Farrar-Glauber (perhitungan ratio f untuk menguji lokasi multikolinearitas). Hasil dari f statistik (f_i) dibandingkan dengan f tabel. Kriteria pengujianya adalah apabila $f_{tabel} > f_i$ maka variabel bebas tersebut kolinier terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika $f_{tabel} < f_i$ maka variabel bebas tersebut tidak kolinier terhadap variabel bebas yang lain.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah alat ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apabila kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lainnya. Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (Gujarati, 2000) :

$$P = 1 - \frac{1}{2} d_w$$

Rumus Hipotesis:

- 1) $H_0 : P = 0$, artinya antara variabel bebas yaitu investasi dan inflasi terjadi autokorelasi terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan terdapat korelasi.
- 2) $H_i : P \neq 0$, artinya antara variabel bebas yaitu investasi dan inflasi tidak terjadi autokorelasi terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan tidak terdapat korelasi

Pengujian hipotesis:

1. Jika d_w, d_L atau $d_w > 4 - d_L$, maka H_0 diterima berarti ada autokorelasi positif maupun negatif
2. Jika $d_u < d_w < 4 - d_u$, maka H_1 , maka H_1 ditolak, berarti tidak ada autokorelasi
3. Jika $d_u < d_w < d_u$ atau $4 - d_u < 4 - d_L$, maka tidak ada kesimpulan

Keterangan

d_u = Durbin Watson tabel pada batas bawah

d_L = Durbin Watson pada tabel batas atas

4) Uji Heterokedastisitas

Salah ciri ideal pada fungsi regresi apabila variasi dari pengganggu selalu sama pada data pengamatan lainnya. Jika ciri ini dipenuhi maka variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homokedastik. Sebaliknya jika keadaan tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan terhadap kondisi ideal tersebut. Penyimpangan faktor pengganggu yang disebut heterokedastisitas

Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi tidak menjadi efisien. Hasil taksiran dapat menjadi kurang dari semestinya dan menyesatkan. Metode Glejser menjelaskan bahwa sesudah regresi, suatu model regresi diperoleh maka nilai absolute residual yang diperoleh yaitu e_i atau X_i diregresikan maka didapatkan bentuk model regresi (Gujarati, 1995).

$$e_i = \alpha_0 + \alpha_1 I + \alpha_2 L + V_i$$

Keterangan :

e_i = nilai absolut residual persamaan estimasi

V_i = error terms

Selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas dengan melihat nilai t probabilitas. Jika nilai t probabilitas lebih besar dari level of signifikan ($\alpha = 5\%$) maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika nilai t probabilitas lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha = 5\%$) maka akan terjadi heterokedastisitas.

3.3 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kebutuhan data dan alat analisis yang dipergunakan. Definisi operasional adalah penjelasan dari masing-masing variabel tersebut diantaranya:

- 1) Investasi adalah komponen pembelanjaan dalam jumlah besar dan sebagai akumulasi modal untuk meningkatkan persediaan peralatan, dan output potensial, serta laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dihitung dalam jutaan rupiah.
- 2) PMDN adalah keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah disetujui dan telah terealisasi. Dalam penelitian ini menggunakan data nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jember. Dihitung dalam jutaan rupiah.
- 3) Inflasi adalah adalah suatu keadaan ekonomi yang memperlihatkan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus menggunakan analisis IHK. Menurut kriteria BPS (Badan Pusat Statistik). Dihitung dalam persentase atau persen.
- 4) Indeks harga Konsumen (IHK) merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat/ laju inflasi. Menurut BPS Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa, menimbang serta menghitung barang yang dibeli konsumen tertentu. Dihitung dalam persentase atau persen.
- 5) Jumlah penduduk miskin menurut kriteria BPS (Badan Pusat Statistik) di Kabupaten Jember. Dihitung dalam satuan jiwa
- 6) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dihitung dalam rupiah
- 7) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dihitung dalam rupiah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian tidak terdapat pengaruh dan terdapat pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Investasi (INV) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (JPM) di Kabupaten Jember.
2. Variabel inflasi (INF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (JPM) di Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian pengaruh investasi dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Investasi dapat tercurahkan secara maksimal, bukan hanya ditujukan pada padat modal tetapi padat karya dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan usaha sehingga kesejahteraan meningkat.
2. Selain itu, adanya ikut campur tangan pemerintah dalam menentukan harga juga menjadi faktor lain serta menjadi penentu kebijakan yang dapat meningkatkan dan menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri sehingga tidak tebebani dengan adanya inflasi dan daya beli masyarakat meningkat.
3. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menganalisa lebih lanjut variabel-variabel yang lebih tepat untuk menghasilkan suatu dugaan yang tepat untuk memperbaiki teori yang telah ada.

Daftar Pustaka

- Adi, Wijaya. 2011. *Pengangguran*. Wartawarga.gunadarma.ac.id diakses tanggal 4 Maret 2012.
- Aprilianti, F. 2014. *“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pengeluaran Publik dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur”*. Jember: Universitas Jember.
- Arikunto. 2006. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Jember Dalam Angka 2000-2015*: Badan Pusat Statistik.
- Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Diakses tanggal 11 November 2009.
- Djannata, Azzi, A. 2011. *“Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menuru SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Di Kota Semarang Dengan Metode AHP(Analisis Hierarki Proses)”*. Skripsi. Semarang.
- Dumairy, 1996, *“Perekonomian Indonesia”*, Erlangga, Jakarta.
- Febriana, Eny. 2010. *Strategi untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin di Perdesaan: Studi Kasus dalam Rumah Tangga Petani Miskin di Desa Cisaat Kecamatan Cicurung Kabupaten Sukabumi*. Universitas Indonesia
- Gujarati, Damodar. 1995-2000. *“Ekonometrika Dasar”*, Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta : Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2004. *“Basic Econometrics Fourt Edition”*. New York: The Mc-Grraw Hill Companies.
- Gujarati, Damodar. 2010. *“Dasar-Dasar Ekonometrika”*. Jakarta: Salempa Empat.
- Gujarati, Damodar. 2012. *“Dasar-Dasar Ekonometrika”*. Jakarta: Salempa Empat.
- Hapsoro, Dody Nursetyo Y. 2013. *“Analisis pengaruh variabel makroekonomi regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 4 Kota*

- di Indonesia Tahun 2007-2010)". Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kraay, A., 2006. When is growth pro-poor? Evidence from a panel of countries. *Journal of Development Economics*;80
- Kuncoro Mudrajad. 1997. "Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga". Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lestari, Wafi Ayu . 2011. "Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum terhadap Tenaga kerja pda IKM kabupaten Semarang Jawa Tengah". Skripsi.
- Murni, Asfia.2006. "Ekonomika Makro". Bandung: PT Refika Aditama.
- Nanga, Mauna. 2005. "Makro Ekonomi Teori, masalah dan kebijakan edisi pertama". Jakarta: Rajawali Press.
- Nasikun. 2001. "System sosial Indonesia". Bandung: Raya Grafindo Persada.
- Nasir, Muhammad., Muhammad Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif, Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Satrio, Danie. 2010. "Analisis Dampak Investasi pada Industri Pulp dan Kertas terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Indonesia". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. 1989. "Metode Penelitian Survei". Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Harminto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". [Http://Deptan.go.id](http://Deptan.go.id)
- Suparmono, 2004. Pengantar Ekonomia Makro, Teori, Soal dan Penyelesaiannya, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Undang-undang republik indonesia bagian pembukaan tahun 1945 tentang tujuan republik indonesia didirikan. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu>.
- Wardhono, A. 2004. "Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi Edisi Pertama". Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Lampiran A

Tabel 4.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Jember Tahun 2014-2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2014	2015
1	Kencong	66733	67251
2	Gumuk Emas	81121	81750
3	Puger	117245	118152
4	Wuluhan	117437	118351
5	Ambulu	107616	108453
6	Tempurejo	72353	72915
7	Silo	106336	107162
8	Mayang	49520	49905
9	Mumbulsari	63832	64327
10	Jenggawah	83265	83911
11	Ajung	76196	76788
12	Rambipuji	80824	81451
13	Balung	78848	79461
14	Umbulsari	81203	71756
15	Semboro	44165	44861
16	Jombang	51200	51598
17	Sumberbaru	101798	102587
18	Tanggul	84742	85339
19	Bangsalsari	116634	117538
20	Panti	60822	61294

Sumber: BPS Jember 2016 (*Jember Dalam Angka*).

Tabel 4.3.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Jember Tahun 2002-2013

No.	Tahun	Pertumbuhan(%)
1	2002	3,94
2	2003	3,99
3	2004	4,63
4	2005	5,01
5	2006	6,22
6	2007	5,89
7	2008	6,03
8	2009	5,55
9	2010	6,04
10	2011	7,03
11	2012	7.21
12	2013	7.63

Sumber: Data BPS Jember Tahun 2012 (*Jember Dalam Angka*).

Tabel 4.3 Indeks Harga Konsumen di Kab Jember Tahun 2010-2015

No	Bulan	Umum /Tahun									
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
1	Januari	236,19	277,08	277,48	302,52	109,93	117,78	113,73	137,16		
2	Februari	241,38	276,89	282,25	303,27	109,75	117,67	113,84	138,26		
3	Maret	250,37	277,21	281,39	303,04	109,92	119,33	124,44	137,85		
4	April	252,03	277,84	282,57	304,11	110,41	119,44	124,81	139,21		
5	Mei	258,86	277,84	283,18	303,30	111,67	199,89	125,28	139,85		
6	Juni	259,91	277,84	285,54	303,77	112,38	120,66	125,63	139,95		
7	Juli	264,56	277,62	287,71	303,63	112,16	122,43	125,65	140,28		
8	Agustus	265,21	277,84	286,91	305,19	112,72	123,53	125,33	140,15		
9	September	265,20	277,59	288,21	306,57	112,66	124,56	125,58	140,93		
10	Oktober	266,80	277,56	289,45	307,96	113,18	134,83	158,91	142,35		
11	November	267,73	277,64	295,02	311,99	114,77	135,53	104,61	142,72		
12	Desember	271,92	277,48	299,47	313,05	115,90	135,44	158,89	144,71		

Sumber Data: BPS Jember Tahun 200-2015 (Jember Dalam Angka)

Lanjutan Tabel 4.3 Indeks harga Konsumen di Kab Jember Tahun 200-2015

No	Bulan	Umum/Tahun									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Januari	145,97	160,86	114,23	118,88	128,74	130,39	110,65	110,65	110,65	
2	Februari	146,74	161,06	114,95	118,93	128,37	130,74	110,70	110,70	110,70	
3	Maret	146,53	161,21	115,52	118,51	127,94	131,12	110,73	110,73	110,73	
4	April	146,71	161,54	114,52	118,92	126,95	131,56	110,74	110,74	110,74	
5	Mei	147,77	161,64	114,99	119,31	126,15	131,15	111,22	111,22	111,22	
6	Juni	147,67	161,69	115,61	120,87	126,96	132,21	111,35	111,35	111,35	
7	Juli	148,54	161,70	115,63	122,80	127,24	133,06	111,81	111,81	111,81	
8	Agustus	149,58	161,93	115,80	123,22	128,12	134,43	111,74	111,74	111,74	
9	September	150,81	162,15	116,95	123,71	128,73	134,39	112,20	112,20	112,20	
10	Oktober	152,61	162,60	117,56	123,96	128,56	134,77	112,34	112,34	112,34	
11	November	153,53	162,33	117,72	124,66	129,32	134,81	114,50	114,50	114,50	
12	Desember	155,20	162,41	118,53	126,93	130,02	135,86	117,52	117,52	117,52	

Sumber Data: BPS Jember Tahun 200-2015 (Jember Dalam Angka).

Tabel 4.4.1 Jumlah Penduduk Miskin Jember Tahun 2000 – 2015.

No	Tahun	Total Kecamatan	Total Desa	RTS-PM (Jiwa)
1	2000	31	248	385500
2	2001	31	248	392300
3	2002	31	248	456000
4	2003	31	248	248100
5	2004	31	248	248100
6	2005	31	248	457810
7	2006	31	248	469385
8	2007	31	248	242567
9	2008	31	248	242567
10	2009	31	248	248356
11	2010	31	248	248356
12	2011	31	248	237700
13	2012	31	248	230629
14	2013	31	248	192951
15	2014	31	248	192951
16	2015	31	248	192951

Sumber: BPS Jember Tahun 2016 (*Jember Dalam Angka*).

Tabel 4.5.1 Perkembangan Investasi di Jember Tahun 2000 – 2015.

No	Tahun	Jutaan (Rp)
1	2000	17,46
2	2001	18,07
3	2002	27,51
4	2003	28,66
5	2004	58,08
6	2005	117,36
7	2006	209,14
8	2007	66,03
9	2008	171,56
10	2009	224,15
11	2010	36,69
12	2011	175,97
13	2012	39,1
14	2013	70,85
15	2014	77,95
16	2015	84,95

Sumber: BPS Jember Tahun 2016 (*Jember Dalam Angka*).

Tabel 4.5.2 Perkembangan Investasi Berdasarkan SIUP dan Klasifikasi

No	Tahun	Klasifikasi Golongan Perusahaan			Nilai Investasi	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
		Besar	Menengah	Kecil		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2000	-	21	502	26815591867	3348
2	2001	5	65	480	35608986181	3348
3	2002	13	79	661	49852581468	3983
4	2003	6	58	795	64096175940	5576
5	2004	13	58	882	137785065000	4438
6	2005	15	78	903	232925100000	5279
7	2006	14	79	1103	149905500000	7367
8	2007	13	61	910	232925100000	5370
9	2008	19	126	1090	149905500000	5962
10	2009	50	104	715	212094000000	5072
11	2010	14	138	1119	227420180000	4404
12	2011	1	77	1172	1914998832000	5740
13	2012	13	202	2092	340069138000	6500
14	2013	3	95	1338	326250889000	6210
15	2014	-	82	1199	350325552000	5233
16	2015	14	70	985	312936702135	2933

*Sumber:*Data BPS Jatim Tahun 2015(*Jember dalam Angka*).

Tabel 4.5.3 Nilai Investasi, Unit Usaha, TK, dan Investasi di Kab Jember

No	Tahun	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK)		Industri Logam, Kimia dan Aneka	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Produksi	Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2001	10791	47536	177972750	18076300
2	2002	856	14091	280426587	27516286
3	2003	27997	86093	291643651	28663738
4	2004	28279	91489	326022934	32803706
5	2005	29031	105527	337581110	34025713
6	2006	29765	110643	381985982	17885987
7	2007	31430	112431	385357764	41175383
8	2008	35838	113584	6566060122	63430993
9	2009	37853	119018	72008942	68865279
10	2010	40331	125524	860334531	82710227
11	2011	43830	117323	963778012	88476438
12	2012	43830	135510	4513623360	617030152
13	2013	43831	138383	5004944793	708599040
14	2014	43921	140880	5774178640	779528607
15	2015	44248	149954	5925038578	849529051

Sumber: Data BPS Jatim Tahun 2015 (*Jember dalam Angka*).

Lampiran B. Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: JPM

Method: Least Squares

Date: 03/06/17 Time: 12:42

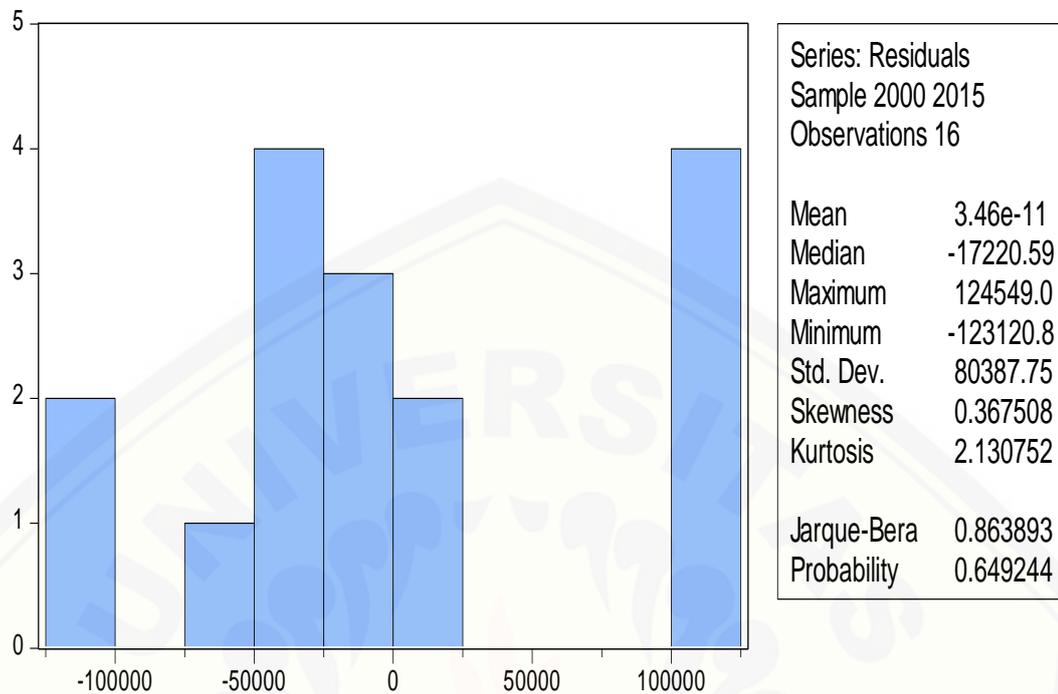
Sample: 2000 2015

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INV	311.1198	335.4653	0.927428	0.3706
INF	15852.05	5838.296	2.715184	0.0177
C	172612.6	52466.71	3.289946	0.0059
R-squared	0.367866	Mean dependent var		292888.9
Adjusted R-squared	0.270615	S.D. dependent var		101108.0
S.E. of regression	86350.29	Akaike info criterion		25.73757
Sum squared resid	9.69E+10	Schwarz criterion		25.88243
Log likelihood	-202.9006	Hannan-Quinn criter.		25.74499
F-statistic	3.782637	Durbin-Watson stat		1.078215
Prob(F-statistic)	0.050729			

INV	311.1198	0.3706
INF	15852.05	0.0177

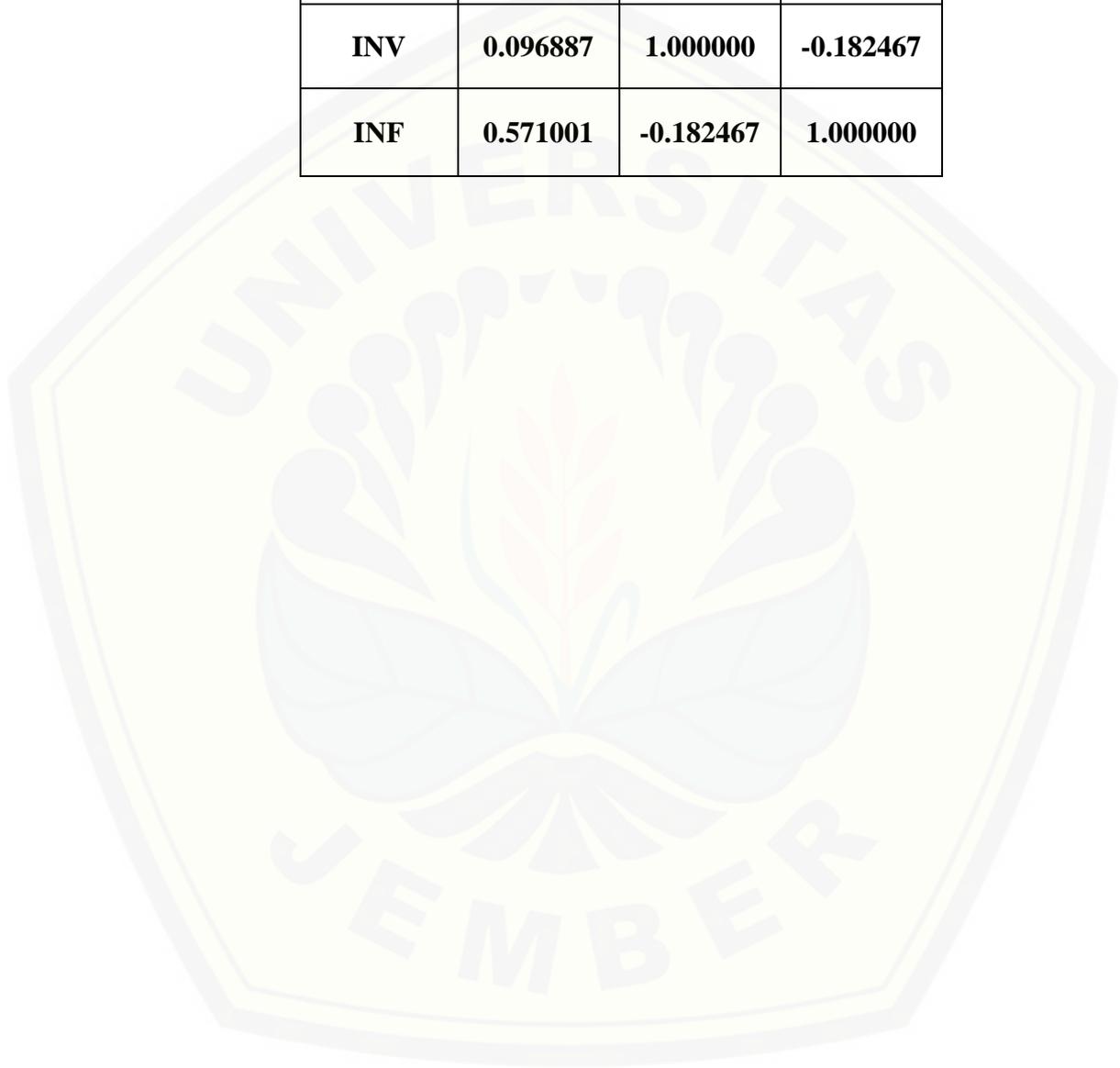
Lampiran C. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)



Jarque-Bera	0.863893
Probability	0.649244

Lampiran D. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas)

	JPM	INV	INF
JPM	1.000000	0.096887	0.571001
INV	0.096887	1.000000	-0.182467
INF	0.571001	-0.182467	1.000000



Lampiran E. Uji Asumsi Klasik (Uji Heteroskedastisitas)

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.917743	Prob. F(2,13)	0.4238
Obs*R-squared	1.979563	Prob. Chi-Square(2)	0.3717
Scaled explained SS	1.590152	Prob. Chi-Square(2)	0.4515

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 03/29/17 Time: 12:21

Sample: 2000 2015

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50934.70	29437.99	1.730237	0.1072
INV	-120.4860	188.2227	-0.640125	0.5332
INF	3463.089	3275.747	1.057191	0.3097
R-squared	0.123723	Mean dependent var		62304.14
Adjusted R-squared	-0.011089	S.D. dependent var		48182.95
S.E. of regression	48449.37	Akaike info criterion		24.58179
Sum squared resid	3.05E+10	Schwarz criterion		24.72665
Log likelihood	-193.6543	Hannan-Quinn criter.		24.58920
F-statistic	0.917743	Durbin-Watson stat		1.717993
Prob(F-statistic)	0.423809			

Obs*R-squared	1.979563	Prob. Chi-Square(2)	0.3717
Scaled explained SS	1.590152	Prob. Chi-Square(2)	0.4515